



PANGAN

Melampaui Politik Beras

Agenda Reformasi Ketahanan Pangan Indonesia

PENULIS

Nailul Huda, Arie Sujito, Mansuetus Darto, dan Silvia Irawan

Pangan | Melampaui Politik Beras: Agenda Reformasi Ketahanan Pangan Indonesia

Penulis : Nailul Huda, Arie Sujito, Mansuetus Darto, Silvia Irawan¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketahanan pangan Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar meningkatkan produksi beras. Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan bertumpu pada paradigma bahwa stabilitas beras identik dengan stabilitas negara. Sebagian besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar, namun kualitas gizi, keberagaman konsumsi, dan ketangguhan sistem pangan masih menjadi tantangan. Ketahanan pangan yang sesungguhnya mensyaratkan sistem produksi yang produktif, berkelanjutan, beragam, serta mampu menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi.

Tulisan ini mengidentifikasi lima persoalan struktural yang saling berkaitan. Pertama, politik beras telah berkembang menjadi paradigma pembangunan pertanian yang menyerap sebagian besar sumber daya negara sekaligus menciptakan rente ekonomi yang lebih banyak dinikmati pelaku perdagangan dan distribusi daripada petani. Kedua, kebijakan pangan masih mengandalkan perluasan lahan melalui berbagai proyek Food Estate, meskipun pola tersebut berulang kali gagal meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan justru menimbulkan kerusakan ekologis. Ketiga, penyusutan lahan sawah terus berlangsung lebih cepat daripada kemampuan negara mencetak sawah baru, menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Keempat, orientasi kebijakan yang berpusat pada beras telah mengikis keberagaman pangan berbasis komunitas dan meningkatkan ketergantungan pada satu komoditas. Kelima, meningkatnya keterlibatan militer dalam tata kelola pangan berisiko menggeser peran institusi sipil, mendistorsi mekanisme pasar, serta mengurangi akuntabilitas pengelolaan sektor pangan.

Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini mengusulkan enam arah reformasi: mengembalikan tata kelola pangan kepada institusi sipil; membangun tata kelola yang terpadu dan berbasis data; menggeser pembangunan pertanian dari ekstensifikasi menuju peningkatan produktivitas; memperkuat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal; mereformasi politik beras agar berorientasi pada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani; serta memastikan program pangan nasional mendukung kualitas gizi, ekonomi lokal, dan keberlanjutan sistem pangan.

PENDAHULUAN

Terlepas dari berbagai klaim mengenai keberhasilan swasembada beras, ketahanan pangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara di kawasan Asia-Pasifik. Selama beberapa dekade terakhir, negara telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi pupuk, pembangunan irigasi, cadangan beras pemerintah, pengendalian impor, hingga berbagai

¹ Damayanti Buchori, Bambang Juanda, Bayu Krisnamurthi, Soedjatmiko, Puspita, Dwi Andreas Santosa, Made Supriatma, Yauri Tetanel, Dyah Ayu (Notulis), Salma Azizah, Rani Septya (Notulis)

program peningkatan produksi. Namun, besarnya investasi publik tersebut belum sepenuhnya menghasilkan sistem pangan yang tangguh, bergizi, dan berkelanjutan.

Paradoks tersebut tercermin dalam berbagai indikator ketahanan pangan. Food Insecurity Experience Scale (FIES) menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar. Sebaliknya, Global Hunger Index (GHI) dan Global Food Security Index (GFSI) masih menunjukkan persoalan serius pada kualitas gizi, ketahanan, dan keberlanjutan sistem pangan. Perbedaan ini menegaskan bahwa kecukupan pangan tidak selalu berarti kedaulatan pangan yang berkualitas.

Paradoks tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi kebijakan pangan Indonesia yang selama beberapa dekade berpusat pada swasembada beras. Swasembada pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan, bukan tujuan akhir ketahanan atau kedaulatan pangan. Instrumen seperti cadangan beras pemerintah melalui BULOG, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi pupuk, pengendalian impor, dan berbagai program peningkatan produksi dirancang untuk memastikan ketersediaan beras nasional dan mencegah kelangkaan pangan pokok. Pendekatan ini berhasil mencapai sasaran yang sempit tersebut, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas gizi masyarakat, keberagaman pangan, keberlanjutan sistem produksi, maupun kesejahteraan petani.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini mencerminkan asimetri prioritas kebijakan (Swinnen, 2021). Krisis beras—kenaikan harga atau kelangkaan pasokan—merupakan risiko politik yang langsung terlihat karena berdampak cepat terhadap inflasi dan daya beli masyarakat (Timmer, 2003; Ikhsan, 2026). Sebaliknya, persoalan seperti stunting, degradasi ekologi, menurunnya keberagaman pangan, maupun lemahnya fondasi sistem pangan berkembang secara perlahan dan jarang menjadi krisis politik dalam satu siklus pemerintahan. Akibatnya, kebijakan lebih banyak diarahkan untuk menjaga stabilitas beras dibandingkan membangun ketahanan pangan dalam pengertian yang lebih luas.

Padahal, Deklarasi World Summit on Food Security mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh penduduk, setiap saat, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai preferensi mereka, yang ditopang empat pilar: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*), dengan dimensi gizi sebagai bagian integral di dalamnya (FAO, 2009), kini diperluas menjadi enam dimensi dengan tambahan agency dan keberlanjutan (HLPE, 2020; Clapp dkk., 2022). Peningkatan produksi beras hanya menjawab dimensi ketersediaan, itu pun untuk satu komoditas. Keterjangkauan pangan sehat merupakan persoalan struktural tersendiri: pola makan sehat masih tidak terjangkau bagi sekitar 2,7 miliar penduduk dunia (FAO dkk., 2026).

Selama ini, kebijakan pangan Indonesia lebih banyak berorientasi pada swasembada dan ketahanan pangan yang diukur melalui produksi nasional, terutama beras. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan membedakan ketiga konsep tersebut: kedaulatan pangan adalah hak negara menentukan kebijakan pangan secara mandiri; kemandirian pangan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri; sedangkan ketahanan pangan adalah terpenuhinya akses setiap orang terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam. Literatur internasional memperluas konsep ini dengan menempatkan petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan skala kecil sebagai aktor utama dalam

menentukan sistem pangan serta mengelola tanah, benih, air, dan pasar secara berkeadilan (Patel, 2009). Sejalan dengan itu, FAO menekankan bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan memerlukan tata kelola yang inklusif, investasi pada petani kecil, dan pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan (FAO, 2009). Karena itu, Indonesia seharusnya menjadikan kedaulatan pangan sebagai tujuan utama, dengan swasembada sebagai salah satu instrumen dan ketahanan pangan sebagai hasil yang ingin dicapai.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh. Keanekaragaman hayati pangannya mencakup 945 jenis, 77 di antaranya sumber karbohidrat (Badan Pangan Nasional, 2024), dari sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, hingga jagung di Madura. Namun modal itu belum tergarap: Indonesia menguasai separuh areal sagu dunia, tetapi konsumsinya hanya 0,36 kg per kapita per tahun (Sidiq dkk., 2021), sementara lahan baku sawah menyusut 79,6 ribu hektar sepanjang 2019–2024 (Bappenas, 2025) di tengah kebijakan yang tetap berorientasi pada satu komoditas.

Berangkat dari kerangka tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa persoalan utama pangan Indonesia bukan semata-mata rendahnya produksi, melainkan paradigma pembangunan yang terlalu berpusat pada politik beras. Paradigma ini memengaruhi pilihan kebijakan, alokasi anggaran, tata kelola kelembagaan, hingga indikator keberhasilan pembangunan pangan. Bagian berikut menguraikan lima temuan utama yang menunjukkan bagaimana paradigma tersebut membentuk berbagai persoalan ketahanan pangan Indonesia, sekaligus menjadi dasar bagi agenda reformasi yang diusulkan.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Politik Beras — Tata Kelola Data Buruk, Politisasi Impor, dan Rente Ekonomi yang Merugikan

Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan Indonesia bertumpu pada satu asumsi: stabilitas beras identik dengan stabilitas negara (Timmer, 2024; Ikhsan, 2026). Sebagai pangan pokok mayoritas penduduk sekaligus komponen utama inflasi, beras menjadi pusat kebijakan melalui BULOG, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi pupuk, pengendalian impor, dan cadangan beras pemerintah. Literatur ekonomi politik pangan menunjukkan bahwa orientasi ini berkembang karena stabilitas harga beras dipandang penting untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas politik (Timmer, 1996, 2005; McCulloch & Timmer, 2008).

Seiring waktu, orientasi tersebut berkembang menjadi paradigma pembangunan pertanian. Keberhasilan sektor pertanian lebih sering diukur melalui produksi padi, luas tanam, dan status swasembada daripada produktivitas, kesejahteraan petani, diversifikasi pangan, atau penguatan kelembagaan ekonomi petani. Akibatnya, sebagian besar anggaran, subsidi, dan perhatian birokrasi diarahkan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga beras. Harga beras harus tetap terjangkau bagi konsumen, tetapi juga cukup tinggi untuk memberi pendapatan yang layak bagi petani. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, negara mengerahkan sumber daya yang besar melalui subsidi, pengadaan pemerintah, cadangan beras, dan pengendalian impor, sehingga investasi jangka panjang pada penelitian, penyuluhan, irigasi, mekanisasi, inovasi, dan hilirisasi menjadi relatif tertinggal.

Konsekuensi paradigma ini tampak pada indikator ketahanan pangan. Prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat (FIES) hanya 4,02 persen pada 2024 (BPS, 2025), dan Global Hunger Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 14,6 atau kategori moderat dengan prevalensi kekurangan gizi hanya 6,3 persen, sementara stunting anak tergolong tinggi yang mencapai 22,6 persen (Welthungerhilfe dkk., 2025). Global Food Security Index juga mencatat skor 60,2 pada 2022, di bawah rata-rata Asia Pasifik (Economist Impact, 2022). Ketersediaan pangan pokok relatif terjaga, tetapi akses terhadap pangan bergizi dan beragam belum terjamin. Belanja pangan lebih dari 98 persen penduduk sebenarnya memadai untuk memenuhi pedoman gizi nasional, namun konsumsi aktual hanya mencapai 42 persen kebutuhan kelompok pangan dan 45 persen zat gizi, dengan beras mendominasi 75–85 persen pangan pokok di semua tingkat pendapatan (Costlow dkk., 2026). Persoalannya bukan daya beli, melainkan pola konsumsi yang terkunci pada satu komoditas.

Ketimpangan capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Politik beras juga menciptakan rente ekonomi yang besar, yang menjelaskan mengapa alokasi sumber daya sulit digeser. Nuryanti dkk. (2017), menemukan bahwa kombinasi kebijakan harga dan impor yang dijalankan melalui BULOG menghasilkan rente ekonomi rata-rata Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari dana ketahanan pangan, disertai kehilangan kesejahteraan sosial Rp0,90 triliun (2,34%), total sekitar seperlima anggaran yang tidak dinikmati produsen, konsumen, maupun pembayar pajak. Rente tersebut tidak mengalir ke petani, melainkan terserap pada simpul-simpul yang memegang privilese kebijakan: Bulog melalui selisih harga pengadaan dan impor, pemerintah melalui penerimaan tarif, penggilingan serta pedagang rekanan yang lebih dahulu menyerap gabah sebelum HPP efektif (Ismail dkk., 2011), dan jaringan elit entitas pangan yang menguasai perizinan impor (Riawanti, 2015). Pada sisi distribusi, evaluasi World Bank (2012) atas program Raskin menunjukkan hanya sekitar 17% dari total biaya program yang benar-benar sampai kepada kelompok sasaran, sementara sebagian besar terserap ke biaya operasional pengadaan, penyimpanan, dan transportasi. Petani kecil sendiri tidak memperoleh manfaat dari kenaikan harga karena menghadapi struktur mendekati monopsoni di tingkat lokal, sehingga harga gabah mereka tidak terintegrasi dengan harga beras pasar, kondisi yang tidak dialami petani menengah dan besar (Makbul dkk., 2015). Struktur oligopsonistik di hulu dan konsentrasi pembeli di sepanjang rantai pasok gabah–beras (Oksalia dkk., 2023) memperkuat asimetri ini, yang tampak pada transmisi harga petani–konsumen yang bersifat asimetris dalam jangka panjang (Yustiningsih & Soetjipto, 2013). Perlu dicatat bahwa rente terserap ke dalam struktur biaya, bukan ke *bottom-line*. Karena itu, laba tipis atau kerugian Bulog selama lima tahun terakhir bukan sanggahan atas keberadaan rente tersebut. Akibatnya, politik beras tidak hanya menyerap anggaran publik yang besar, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi yang mempertahankan status quo tata niaga yang timpang.

Temuan ini menunjukkan bahwa swasembada beras bukanlah sinonim dari ketahanan pangan. Swasembada merupakan instrumen untuk menjamin kecukupan produksi, sedangkan ketahanan pangan mencakup akses terhadap pangan bergizi, keberlanjutan sistem produksi, keberagaman pangan, dan kesejahteraan petani. Tantangan Indonesia kini bukan lagi sekadar menjaga stabilitas beras, melainkan mentransformasikan sistem pangan. Keberhasilan pembangunan pertanian perlu diukur melalui produktivitas, pendapatan petani, penguasaan aset produktif, diversifikasi pangan, dan regenerasi petani, bukan semata volume produksi atau status swasembada.

Temuan 2. Ketergantungan pada Ekstensifikasi Lahan Menghambat Produktivitas dan Merusak Fondasi Ketahanan Pangan

Selama lebih dari lima dekade, kebijakan pangan Indonesia lebih banyak merespons ancaman kekurangan pangan melalui perluasan lahan daripada peningkatan produktivitas. Ketika produksi dianggap belum mencukupi, solusi yang berulang adalah membuka kawasan pertanian baru, dari Proyek Lahan Gambut Sejuta hektar 1995 hingga food estate dewasa ini (McCarthy & Obidzinski, 2017), bukan meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada melalui penelitian, penyuluhan, rehabilitasi irigasi, konsolidasi lahan, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan petani. Hasilnya minim: dari lahan yang dibuka, yang benar-benar ditanami hanya 0,2 persen pada era Soeharto, 8,6 persen pada era SBY, dan 2,4 persen pada era Jokowi, padahal intensifikasi berpotensi menghasilkan tambahan 11,84 juta ton padi dibanding target food estate 5 juta ton per tahun (Supriyanto dkk., 2025). Akibatnya, keberhasilan pembangunan lebih sering diukur dari luas areal tanam daripada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Food Estate merupakan manifestasi paling nyata dari paradigma tersebut. Dari Rice Estate Palembang pada 1970-an (Matanasi, 2024), Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare tahun 1995 (Kompas.com, 2020; WALHI, 2024), hingga Food Estate di Kalimantan Tengah, Keerom, dan Papua Selatan (Mongabay Indonesia, 2024; Jubi, 2025b), polanya selalu serupa: pembukaan kawasan berskala besar, investasi publik yang tinggi, pendekatan top-down, dan hasil yang jauh dari target (Abdulgani & Savitri, 2025; Kompas.com, 2025). Proyek Food Estate di Keerom, lahan yang menggusur kebun masyarakat kini ditinggalkan bersama traktor dan infrastruktur yang mangkrak (Jubi, 2025a, 2025b; Project Multatuli, 2026). Proyek Food Estate di Gunung Mas, lahan yang tidak sesuai secara agronomis tetap dipaksakan menjadi kawasan produksi (Mongabay Indonesia, 2024; Tempo, 2023). Proyek Food Estate di Papua Selatan, ribuan alat berat didistribusikan sebelum kesiapan lahan, kelembagaan, dan kapasitas petani tersedia (Jawa Pos, 2024; Tempo, 2024; Papua Selatan Pos, 2025). Pola yang terus berulang selama lebih dari lima dekade menunjukkan bahwa persoalannya bukan terletak pada satu proyek atau pemerintahan, melainkan pada paradigma yang menempatkan pembukaan lahan sebagai solusi utama peningkatan produksi (Abdulgani & Savitri, 2025).

Pendekatan ini berbeda dengan negara-negara yang berhasil mentransformasikan pertaniannya. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam meningkatkan produksi terutama melalui investasi pada produktivitas—penelitian, penyuluhan, konsolidasi lahan, irigasi, mekanisasi, dan inovasi—bukan melalui pembukaan lahan baru (Kikuchi & Hayami, 1978; World Bank, 2021). Bahkan Vietnam, meskipun menghadapi fragmentasi lahan yang sama parahnya dengan Indonesia, memilih melindungi lahan sawah yang ada dan meningkatkan efisiensinya daripada terus melakukan ekspansi (Chu dkk., 2021).

Biaya pendekatan ekstensifikasi juga jauh melampaui pemborosan anggaran. Pembukaan hutan dan lahan gambut untuk pertanian monokultur merusak habitat, mengurangi keanekaragaman hayati, mengganggu fungsi hidrologi, serta meningkatkan emisi karbon. Pengeringan gambut mempercepat subsidensi dan secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau, sementara hilangnya tutupan hutan memperbesar risiko banjir dan mengurangi kemampuan bentang alam menyimpan air. Dengan demikian, upaya meningkatkan produksi melalui pembukaan lahan justru melemahkan fondasi ekologis yang menopang produksi pangan jangka panjang.

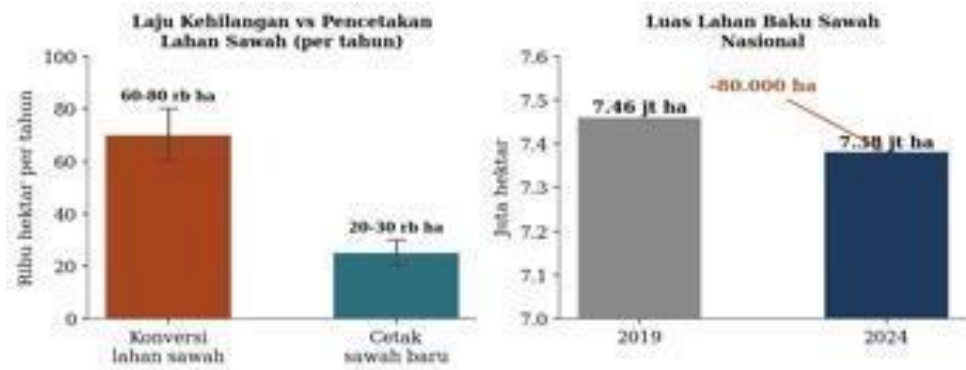
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama pertanian Indonesia bukan lagi kekurangan lahan, melainkan rendahnya produktivitas. Selama kebijakan lebih mengutamakan ekspansi kawasan daripada investasi pada produktivitas, inovasi, rehabilitasi lahan, dan penguatan kapasitas petani, Indonesia akan terus mengulang proyek-proyek berskala besar yang mahal, berisiko tinggi, dan berumur pendek. Pergeseran dari paradigma ekstensifikasi menuju peningkatan produktivitas menjadi prasyarat bagi sistem pangan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Temuan 3: Alih Fungsi Lahan Sawah Tidak Terkendali

Lahan pertanian produktif terus menyusut. Estimasi konversi sawah bervariasi, berkisar 60.000–80.000 hektar per tahun menurut BPS dan ATR/BPN (Kompas.com, 2026a), bahkan mencapai 90.000–150.000 hektar menurut sejumlah kajian (Kompas.com, 2021; Kompas.id, 2024). Namun, seluruh sumber menunjukkan pola yang sama: kemampuan negara mencetak sawah baru, sekitar 20.000–30.000 hektar per tahun, jauh tertinggal dari laju kehilangan lahan (Kompas.com, 2021). Akibatnya, luas lahan baku sawah turun dari 7,46 juta hektar pada 2019 menjadi 7,38 juta hektar pada 2024 (Kompas.id, 2024).

Penyusutan ini mencerminkan lemahnya perlindungan lahan pertanian. Alih fungsi untuk permukiman, industri, infrastruktur, dan proyek strategis terus berlangsung, sementara implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum efektif. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menargetkan 87 persen lahan baku sawah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 2029, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah (Kompas.com, 2026b).

Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa kondisi ini bukan keniscayaan, melainkan pilihan kebijakan. Meskipun menghadapi fragmentasi lahan dan urbanisasi yang tinggi, Vietnam mempertahankan luas tanam padi sekitar 7,5 juta hektar sejak 2001 melalui perlindungan hukum atas lahan sawah dan program konsolidasi lahan (*dồn điền đổi thửa*) yang meningkatkan efisiensi tanpa memperluas areal (Chu dkk., 2021). Konsolidasi tersebut bekerja layaknya perubahan teknis: menaikkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, mendorong mekanisasi, sekaligus melepaskan tenaga kerja ke sektor nonpertanian (Nguyen & Warr, 2020). Sebaliknya, Indonesia masih lebih mengandalkan pencetakan sawah baru daripada melindungi dan meningkatkan produktivitas lahan yang telah ada. Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan sekadar kehilangan lahan, melainkan paradigma yang terus mengejar perluasan areal tanam ketika prioritas seharusnya adalah melindungi dan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.



Grafik 14.1. Ketimpangan antara laju konversi dan pencetakan sawah, serta penyusutan lahan baku sawah nasional.

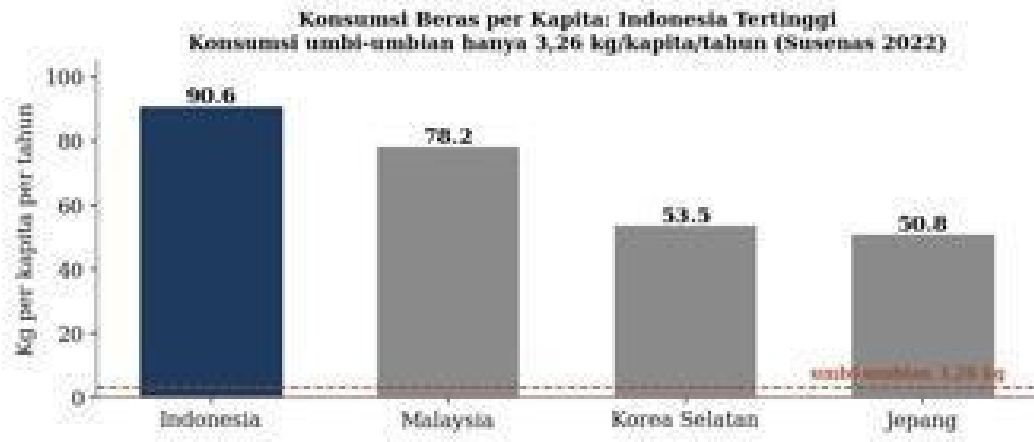
Sumber: ATR/BPN dan Kementan (dalam Kompas.id, 2024).

Temuan 4: Kebijakan Pangan Menghancurkan Diversifikasi

Orientasi kebijakan pangan yang berpusat pada beras telah mengikis keberagaman sistem pangan Indonesia. Di berbagai daerah, seperti Papua, Maluku, Madura, dan Nusa Tenggara, pangan berbasis komunitas—sagu, jagung, sorgum, umbi-umbian, serta hasil hutan—secara bertahap tersisih oleh distribusi beras melalui berbagai program pemerintah. Akibatnya, pangan berbasis komunitas semakin dipersepsikan sebagai simbol ketertinggalan, meskipun secara ekologis lebih sesuai dengan kondisi setempat dan telah menopang ketahanan pangan masyarakat selama berabad-abad. Ketika sistem pangan berbasis komunitas melemah, masyarakat justru menjadi semakin bergantung pada pasokan beras dari luar daerah maupun pemerintah.

Paradigma yang menyamakan "pangan" dengan "beras" menciptakan kerentanan baru. Ketergantungan pada satu komoditas membuat ketahanan pangan nasional semakin rentan terhadap gangguan produksi domestik maupun gejolak harga internasional. Hal ini tercermin dari pola impor beras yang beberapa kali meningkat tajam menjelang dan sesudah pemilu, menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan, tetapi juga pertimbangan politik dan stabilitas harga.

Ketergantungan masyarakat terhadap beras juga masih sangat tinggi. Konsumsi beras mencapai sekitar 90,6 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Korea Selatan, maupun Jepang (Agrofarm, 2025). Sebanyak 98,35 persen rumah tangga mengonsumsi beras secara rutin (Kompas.id, 2023), sementara konsumsi umbi-umbian hanya sekitar 3,26 kilogram per kapita per tahun (Agrofarm, 2025). Padahal Indonesia memiliki potensi pangan berbasis komunitas yang sangat besar, termasuk sekitar 5,5 juta hektar hutan sagu yang belum dimanfaatkan secara optimal (Indonesia.go.id, 2024). Dominasi beras ini memperbesar tekanan terhadap impor sekaligus mempersempit diversifikasi konsumsi pangan.



Grafik 14.2. Konsumsi beras per kapita Indonesia dibandingkan negara lain, serta rendahnya konsumsi umbi-umbian.

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025.

Paradigma tersebut juga mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sistem agroekologi yang sangat beragam. Ketahanan pangan tidak dapat dibangun melalui satu komoditas atau satu model produksi. Di Papua, misalnya, sagu, hasil hutan, dan ikan sungai merupakan fondasi sistem pangan yang lebih sesuai dengan karakter ekosistem setempat. Ketika hutan dikonversi menjadi pertanian monokultur, yang hilang bukan hanya tutupan hutan, tetapi juga sumber pangan, pengetahuan lokal, keanekaragaman hayati, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan bukan sekadar persoalan budaya atau preferensi konsumsi, melainkan strategi ketahanan pangan. Mengakui dan mengembangkan pangan berbasis komunitas akan mengurangi ketergantungan pada beras, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta membangun sistem pangan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan gejolak pasar.

Temuan 5. Militerisasi Tata Kelola Pangan Menggeser Peran Institusi Sipil

Keterlibatan militer dalam sektor pangan bukanlah fenomena baru, tetapi mengalami eskalasi sejak program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) pada 2015 (Kamim, 2019; Project Multatuli, 2025) dan semakin menguat pada periode 2024–2025. Peran TNI kini mencakup pendampingan produksi, distribusi pupuk, penyerapan gabah, hingga rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota (SETARA Institute, 2026; Tempo, 2026). Pada awal 2025, misalnya, Babinsa dilibatkan mengawal penyerapan gabah petani oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram (CNN Indonesia, 2025). Kebijakan ini berhasil meningkatkan stok Bulog hingga rekor tertinggi, tetapi tidak diikuti penurunan harga beras di tingkat konsumen (Alinea.id, 2025), menunjukkan bahwa penyerapan berbasis komando tidak serta-merta menyelesaikan persoalan distribusi maupun efisiensi pasar.

Pendekatan ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu penggunaan instrumen komando untuk mengelola sistem yang bergantung pada fleksibilitas ekologi, pengetahuan agronomis, dan mekanisme pasar. Ketika aparat terlibat dalam menentukan pola tanam, mengawasi distribusi pupuk, dan menyerap hasil panen, setidaknya muncul tiga risiko. Pertama,

berkurangnya otonomi petani dalam menentukan keputusan usaha taninya. Kedua, distorsi harga karena penyerapan dilakukan berdasarkan instruksi administratif, bukan permintaan pasar. Ketiga, melemahnya akuntabilitas karena batas kewenangan antara institusi teknis dan aparat keamanan menjadi semakin kabur.

Pendekatan ini juga membawa konsekuensi fiskal. Rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan membutuhkan investasi puluhan miliar rupiah di setiap lokasi serta biaya operasional yang besar. Sumber daya tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar apabila dialihkan untuk memperkuat penyuluhan pertanian, rehabilitasi irigasi, penelitian, mekanisasi, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Perlu diakui bahwa sebagian pihak menilai keterlibatan TNI dapat mempercepat pelaksanaan program dan menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek. Namun, berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Imparsial, YLBHI, dan KPA, mengingatkan bahwa perluasan peran aparat keamanan berisiko menggeser tata kelola pangan dari pendekatan sipil yang partisipatif menuju pendekatan komando. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar efektivitas pelaksanaan program, melainkan bagaimana memastikan bahwa tata kelola pangan tetap dipimpin oleh institusi sipil yang memiliki kapasitas teknis, akuntabilitas, dan ruang deliberasi publik.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah yang sistem pangan dan pertaniannya berdaulat, berkelanjutan, dan berkeadilan, di mana petani menjadi subjek utama pembangunan, lahan produktif terlindungi, pangan lokal berkembang, dan setiap petani memperoleh penghidupan yang layak melalui produktivitas, kelembagaan ekonomi yang kuat, rantai nilai yang adil, serta perlindungan dari risiko ekonomi dan perubahan iklim.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengembalikan tata kelola pangan kepada institusi sipil yang demokratis

Pengelolaan pangan harus kembali dipimpin oleh institusi sipil yang inklusif, memiliki kompetensi teknis, akuntabilitas, dan legitimasi publik (Acemoglu & Robinson, 2012). Keterlibatan TNI dan Polri dalam produksi pertanian, distribusi sarana produksi, penyerapan hasil panen, maupun Proyek Strategis Nasional bidang pangan perlu dihentikan secara bertahap agar tidak menciptakan institusi ekstraktif yang sentralistik. Oleh karena itu, rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan perlu dibatalkan, dan sumber daya fiskalnya dialihkan untuk memperkuat penyuluhan pertanian, rehabilitasi irigasi, penelitian, dan penguatan kelembagaan petani.

2. Membangun tata kelola pangan yang terpadu, berbasis data, dan desentralistik

Koordinasi kebijakan pangan perlu diperkuat lintas kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan produksi, perdagangan, dan perlindungan petani berjalan selaras. Kementerian PPN/Bappenas perlu kembali memimpin perencanaan jangka panjang berbasis bukti, sementara pemerintah daerah diberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai untuk mengembangkan sistem pangan sesuai karakteristik wilayahnya. Seluruh data pangan—produksi, stok, luas tanam, luas panen, irigasi, harga, dan distribusi—harus dipublikasikan secara berkala, terbuka, dan dapat diaudit publik.

3. Menggeser pembangunan pangan dari ekstensifikasi menuju peningkatan produktivitas

Pembangunan pangan harus berfokus pada peningkatan produktivitas lahan yang telah ada melalui investasi pada penelitian, penyuluhan, rehabilitasi irigasi, mekanisasi, konsolidasi lahan, inovasi, serta pemulihan kesehatan tanah. Moratorium Food Estate perlu diberlakukan hingga tersedia evaluasi menyeluruh mengenai kelayakan ekologis, sosial, agronomis, fiskal, dan tata kelolanya. Perluasan produksi hanya dilakukan pada lahan yang telah terbuka dan sesuai secara ekologis, bukan melalui pembukaan hutan atau ekosistem bernilai konservasi tinggi.

4. Membangun sistem pangan yang beragam, tangguh, dan berbasis potensi lokal

Ketahanan pangan perlu dibangun melalui diversifikasi pangan sesuai karakter agroekologi Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan regionalisasi pangan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur; memperkuat masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga benih dan keanekaragaman hayati; mengembangkan bank benih komunitas; serta memperluas dukungan bagi komoditas lokal seperti sagu, sorgum, jagung, umbi-umbian, dan pangan hutan. Regenerasi petani juga perlu didukung melalui akses lahan, pembiayaan, pendidikan, dan jaminan pasar bagi generasi muda.

5. Mereformasi politik beras menuju ketahanan pangan yang berpusat pada masyarakat

Keberhasilan kebijakan pangan perlu diukur berdasarkan ketahanan pangan rumah tangga, kualitas gizi, dan kesejahteraan petani, bukan semata-mata status swasembada beras. Tata kelola BULOG, impor beras, serta distribusi pupuk bersubsidi harus lebih transparan dan akuntabel melalui publikasi data stok, pengadaan, dan distribusi secara berkala. Kebijakan harga dan subsidi perlu lebih tepat sasaran serta disertai sinkronisasi antara kebijakan produksi dan perdagangan. Dalam jangka panjang, belanja pertanian perlu bergeser dari subsidi rutin dan stabilisasi harga menuju investasi produktif pada riset, penyuluhan, koperasi petani, mekanisasi, hilirisasi, dan inovasi.

6. Memastikan program pangan berpihak pada kualitas gizi dan ekonomi lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola, keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Program pangan nasional harus dirancang untuk memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan permintaan terhadap produk petani dan nelayan, serta mendorong sistem pangan yang sehat, beragam, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Persoalan pangan Indonesia tidak terutama terletak pada ketidakmampuan negara meningkatkan produksi, melainkan pada paradigma pembangunan pangan yang terlalu lama berpusat pada swasembada beras. Orientasi tersebut telah menjaga ketersediaan beras dan stabilitas pasokan, tetapi belum menghasilkan sistem pangan yang secara menyeluruh bergizi, beragam, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan karena itu tidak dapat disamakan dengan kecukupan produksi beras, karena juga mencakup akses terhadap pangan bergizi, keberagaman pangan, keberlanjutan sumber daya, dan kesejahteraan produsen.

Lima temuan menunjukkan bagaimana paradigma tersebut membentuk persoalan yang saling berkaitan: politik beras menghasilkan tata kelola dan insentif ekonomi yang mempertahankan ketergantungan pada satu komoditas; ketergantungan pada ekstensifikasi mengalihkan perhatian dari peningkatan produktivitas; alih fungsi sawah terus mengurangi fondasi produksi pangan; kebijakan yang berpusat pada beras melemahkan diversifikasi pangan dan sistem pangan berbasis komunitas; sementara semakin luasnya keterlibatan institusi keamanan menggeser tata kelola pangan dari pendekatan sipil dan teknis menuju pendekatan komando. Dengan demikian, persoalan pangan bukan sekadar persoalan produksi, tetapi juga persoalan tata kelola, alokasi sumber daya, kelembagaan, dan arah kebijakan.

Karena itu, transformasi sistem pangan perlu bergeser dari paradigma produksi dan stabilisasi beras menuju ketahanan pangan yang berpusat pada masyarakat. Pergeseran tersebut mencakup penguatan tata kelola sipil dan demokratis, perencanaan berbasis data, peningkatan produktivitas lahan yang telah ada, perlindungan lahan pertanian, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, reformasi tata kelola beras dan subsidi, serta penguatan kualitas gizi dan ekonomi lokal. Dengan arah tersebut, swasembada ditempatkan sebagai salah satu instrumen, bukan sebagai tujuan akhir, sementara keberhasilan pembangunan pangan diukur dari ketahanan pangan rumah tangga, kualitas gizi, keberagaman pangan, keberlanjutan sistem produksi, dan kesejahteraan petani.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulgani, F., & Savitri, L. A. (2025). State, capital and coercion in Indonesia's food estates. *Journal of Agrarian Change*, 25(4), e70031. <https://doi.org/10.1111/joac.70031>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.
- Agrofarm. (2025). Konsumsi beras RI 90,6 kg per kapita per tahun, kalahkan Malaysia dan Korea. <https://www.agrofarm.co.id/2025/05/konsumsi-beras-ri-906-kg-per-kapita-per-tahun-kalahkan-malaysia-dan-korea/>

- Alinea.id. (2025). Stok beras Bulog: Prestasi atau masalah. <https://www.alinea.id/peristiwa/stok-beras-bulog-prestasi-atau-masalah-b2nsN9RYt>
- Badan Pangan Nasional. (2024). Peringatan Hari Pangan Sedunia 2024, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi beberkan keunggulan biodiversitas Indonesia dan potensi sorgum sebagai sumber karbohidrat yang sarat gizi (Siaran Pers No. 218/R-NFA/X/2024). <https://pustaka.badanpangan.go.id/publikasi/67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7>
- Badan Pangan Nasional. (2025). NFA Dorong Strategi Jangka Panjang Tekan Inflasi Lewat Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal. <https://pustaka.badanpangan.go.id/publikasi/74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berdasarkan Food Insecurity Experience Scale (FIES). <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTQ3NCMy/>
- Chu, L., Nguyen, H. T. M., Kompas, T., Dang, K., & Bui, T. (2021). Rice land protection in a transitional economy: The case of Vietnam. *Heliyon*, 7(4), e06754. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06754>
- Clapp, J., Moseley, W. G., Burlingame, B., & Termine, P. (2022). Viewpoint: The case for a six-dimensional food security framework. *Food Policy*, 106, 102164. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164>
- CNN Indonesia. (2025, 6 Maret). Bulog libatkan Babinsa serap harga gabah petani. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250306091809-92-1205586/bulog-libatkan-babinsa-serap-harga-gabah-petani>
- Costlow, L., Gilbert, R., Masters, W. A., Ortenzi, F., Beal, T., Deo, A., Sutiyo, W., Noor, S., & Gonzalez, W. (2026). Healthy diets are affordable but often displaced by other foods in Indonesia. *Food Policy*, 140, 103076. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103076>
- Economist Impact. (2022). Global Food Security Index 2022. Economist Impact.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). *Declaration of the World Summit on Food Security* (WSFS 2009/2). FAO. <https://www.fao.org/4/k6050e/k6050e.pdf>
- [FAO] Food and Agriculture Organization. (2026). Crops and livestock products [Data set]. FAOSTAT.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2026). The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 – Understanding and addressing the high cost of a healthy diet. Rome. <https://doi.org/10.4060/cd8306en>
- HLPE. (2020). Food security and nutrition: Building a global narrative towards 2030. High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Committee on World Food Security.
- Ikhsan, M. (2026). *Understanding Indonesia's high rice prices: Structural costs, protection, and the political economy of persistence* (LPEM-FEB UI Working Paper No. 089). Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia.
- Indonesia.go.id. (2024). Lahan sagu terluas di dunia, peluang ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8481/lahan-sagu-terluas-di-dunia-peluang-ekonomi-dan-ketahanan-pangan-indonesia>
- Ismail, A., Putri, E.I.K., Novindra, & Nuva. (2011). *Dampak kebijakan dan efektivitas HPP gabah/beras terhadap kesejahteraan petani Indonesia*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian IPB 2011.

- Jawa Pos. (2024). Kejar target 1 juta hektare lahan pangan di Merauke, ribuan excavator mulai datang dari Tiongkok. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014918125/kejar-target-1-juta-hektare-lahan-pangan-di-merauke-ribuan-excavator-mulai-datang-dari-tiongkok>
- Jubi. (2025a). Pemkab Keerom diminta mengevaluasi proyek food estate jagung. <https://www.teras.id/jubi-id/rubrik/berita-daerah/pemkab-keerom-diminta-mengevaluasi-proyek-food-estate-jagung-2075563>
- Jubi. (2025b). Proyek lumbung Keerom yang seumur jagung. <https://www.teras.id/jubi-id/rubrik/mendalam/proyek-lumbung-keerom-yang-seumur-jagung-2070349>
- Kamim, A. B. M. (2019). Kawula tani di bawah sepatu lars: Militer dalam program Upsus Pajale tahun 2015–2017 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal PolGov*. <https://journal.ugm.ac.id/polgov/article/view/60201>
- Kikuchi, M., & Hayami, Y. (1978). Agricultural growth against a land resource constraint: A comparative history of Japan, Taiwan, Korea, and the Philippines. *The Journal of Economic History*, 38(4), 839–864. <https://doi.org/10.1017/S002205070008712X>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Pemerintah perkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk jaga ketahanan pangan nasional*. <https://bappenas.go.id/id/berita/pemerintah-perkuat-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah-untuk-jaga-ketahanan-pangan-nasional-cnhh1>
- Kompas.com. (2020). "Food estate" dan kilas balik Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar. <https://www.kompas.com/properti/read/2020/06/24/070000221/food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar>
- Kompas.com. (2021). Indonesia berpotensi kehilangan 90.000 hektar sawah per tahun akibat alih fungsi. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/22/145447621/indonesia-berpotensi-kehilangan-90000-hektar-sawah-per-tahun-akibat>
- Kompas.id. (2023). Beras, oh, beras. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/17/beras-oh-beras-1>
- Kompas.com. (2025). Profesor IPB ungkap pemicu gagalnya program food estate. <https://lestari.kompas.com/read/2025/04/30/140000286/profesor-ipb-ungkap-pemicu-gagalnya-program-food-estate>
- Kompas.com. (2026a). Lahan sawah di Indonesia menyusut hingga 80.000 hektar per tahun. <https://www.kompas.com/properti/read/2026/07/03/130000921/lahan-sawah-di-indonesia-menyusut-hingga-80.000-hektar-per-tahun>
- Kompas.com. (2026b). Perpres 4/2026, alih fungsi lahan dikendalikan pemerintah pusat. <https://www.kompas.com/properti/read/2026/02/11/113836621/perpres-24-2026-alih-fungsi-lahan-dikendalikan-pemerintah-pusat>
- Kompas.id. (2024). Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/11/mengendalikan-alih-fungsi-lahan-pertanian>
- Makbul, Y., Pradono, Ratnaningtyas, S., & Dwiyanoro, P. (2015). *The effect of market structure on the integration of rice prices with paddy prices and its impact on farmers' family income in the Kroya district, Indramayu Regency, Indonesia*. *The Journal of Developing Areas*, 49(3), 217–228. <https://doi.org/10.1353/jda.2015.0156>
- Matanasi, P. (2024, 14 Januari). Dulu rice estate kini food estate. *Historia*. <https://historia.id/politik/articles/dulu-rice-estate-kini-food-estate-DOyXe>

- McCarthy, J. F., & Obidzinski, K. (2017). Framing the food poverty question: Policy choices and livelihood consequences in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 54, 344-354. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.004>
- McCulloch, N., & Timmer, C. P. (2008). *Rice policy in Indonesia: A special issue*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 33-44. <https://doi.org/10.1080/00074910802001561>
- Mongabay Indonesia. (2024, 24 September). Menyoal food estate, ancaman kemandirian pangan masyarakat. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/menyoal-food-estate-ancaman-kemandirian-pangan-masyarakat/>
- Nguyen, Huy Quynh & Warr, Peter. (2020). *Land consolidation as technical change: Economic impacts in rural Vietnam*. *World Development*. vol. 127. artikel 104750. DOI 10.1016/j.worlddev.2019.104750.
- Nuryanti, S., Hakim, D.B., Siregar, H., & Sawit, M.H. (2017). *Political Economic Analysis of Rice Self-Sufficiency in Indonesia*. *Indonesian Journal of Agricultural Science*, 18(2), 77-86. DOI: 10.21082/ijas.v.18.n2.2017.p.77-86
- Oksalia, E. P., Asmarantaka, R. W., & Yusalina. (2023). *Efisiensi pemasaran beras dengan pendekatan structure conduct performance*. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 11(1), 87-104. <https://doi.org/10.29244/jai.2023.11.1.87-104>
- Papua Selatan Pos. (2025). 200 hektar lahan "program cetak sawah" di Kampung Bokem terbengkalai. <https://papaselatanpos.com/2025/09/16/200-hektar-lahan-program-cetak-sawah-di-kampung-bokem-terbengkalai/>
- Patel, R. (2009). *What does food sovereignty look like?* *The Journal of Peasant Studies*, 36(3), 663-673. <https://doi.org/10.1080/03066150903143079>
- Project Multatuli. (2025). Peran militer membesar: Apakah Prabowo sedang melakukan autogolpe?. <https://projectmultatuli.org/peran-militer-membesar-apakah-prabowo-sedang-melakukan-autogolpe/>
- Project Multatuli. (2026). Dosa-dosa PSN: Mengapa kita harus menolak proyek pembangunan yang mensponsori kematian. <https://projectmultatuli.org/dosa-dosa-psn/>
- Riawanti, W. (2015). *Kajian ekonomi politik kebijakan pangan: Studi kasus rent-seeking dalam impor beras tahun 1999-2009*. Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada.
- Sidiq, F. F., Coles, D. ., Hubbard, C. ., Clark, B. ., & Frewer, L. J. . (2021). Sago and the indigenous peoples of Papua, Indonesia: A review. *Journal of Agriculture and Applied Biology*, 2(2), 138-149. <https://doi.org/10.11594/jaab.02.02.08>
- SETARA Institute. (2026). Distorsi fungsi pertahanan TNI dalam pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. https://setara-institute.org/media_setara/distorsi-fungsi-pertahanan-tni-dalam-pembentukan-batalyon-teritorial-pembangunan/
- Supriyanto, R., Maharani, A., & Alta, A. (2025). Menafsir ulang food estate Indonesia: Jejak, dinamika, dan masa depan ketahanan pangan nasional (Ringkasan Kebijakan No. 28). Center for Indonesian Policy Studies.
- Swinen, J. (2021). The political economy of agricultural and food policies. Dalam K. Otsuka & S. Fan (Ed.), *Agricultural development: New perspectives in a changing world* (Bab 14). International Food Policy Research Institute. <https://doi.org/10.2499/9780896293830>
- Tempo. (2023). Cerita sedih kegagalan food estate Sumatera Utara: 80 persen lahan kini terlantar. <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-sedih-kegagalan-food-estate-sumatera-utar-a-80-persen-lahan-kini-terlantar-93614>

- Tempo. (2024). Peneliti IPB yakin proyek cetak sawah dan tebu di Merauke akan gagal. <https://www.tempo.co/lingkungan/peneliti-ipb-yakin-proyek-cetak-sawah-dan-tebu-di-merauke-akan-gagal-7285>
- Tempo. (2026, 19 Mei). Kemhan targetkan pembentukan 150 batalyon teritorial pembangunan per tahun. <https://www.tempo.co/politik/kemhan-targetkan-pembentukan-150-batalyon-teritorial-pembangunan-per-tahun-2136807>
- Timmer, C. P. (1996). Does Bulog stabilise rice prices in Indonesia? Should it try? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32(2), 45–74. <https://doi.org/10.1080/00074919612331336938>
- Timmer, C. P. (2003). Food security and rice price policy in Indonesia: The economics and politics of the food price dilemma.
- Timmer, C. P. (2005). Food security in Indonesia: Current challenges and the long-run outlook (Working Paper No. 48). Center for Global Development.
- Timmer, C. P. (2024). How I learned to stabilize rice prices, and why: A retrospective essay. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 21(20th Anniversary Issue), 1–18. <https://doi.org/10.37801/ajad2024.21.20AI.pl>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360 (Indonesia). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- WALHI. (2024). Hentikan proyek cetak sawah/food estate di lahan gambut di Kalimantan Tengah. <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-t-di-kalimantan-tengah>
- Welthungerhilfe, Concern Worldwide, & Institute for International Law of Peace and Armed Conflict. (2025). 2025 Global Hunger Index: 20 years of tracking progress: Time to recommit to zero hunger. WHH; Concern Worldwide; IFHV.
- World Bank. (2012). *Raskin subsidized rice delivery: Social assistance program and public expenditure review 3*. Washington, DC.
- World Bank. (2021). *Agricultural innovation in developing East Asia: Productivity, safety, and sustainability*. World Bank.
- Yustiningsih, F., & Soetjipto, W. (2013). *Analisa transmisi harga beras petani-konsumen di Indonesia periode tahun 2000–2011*. Jurnal Kebijakan Ekonomi.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD